

Rupiah Melemah,

Sri Mulyani Ancam Pengusaha yang Tahan Dolar

Reporter: **Ahmad Faiz Ibnu Sani**

Editor: **Dewi Rina Cahyani**

Senin, 3 September 2018 20:06 WIB



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbicara dengan petugas saat mengecek persiapan Asian Games 2018 di Terminal 3 Bandara Soekarno - Hatta, Tangerang, Senin, 13 Agustus 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bergerak cepat sesuai rupiah berada di level terendah sejak 1998. Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang siang tadi masih berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, bergegas ke Jakarta dan mengumpulkan para menterinya untuk rapat di Istana.

Menteri Keuangan [Sri Mulyani](#) mengatakan pemerintah melalui forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan memantau detail perilaku pelaku pasar. "Kami akan bersama-sama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, lewat forum KSSK, akan meneliti dan memonitor secara detail tingkah laku pelaku pasar. Mana-mana transaksi yang *legitimate* demi memenuhi keperluan industrinya, atau tidak *legitimate*," katanya sesuai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 3 September 2018.

Baca: [Gerindra Kritik Utang Pemerintah, Begini Jawaban Sri Mulyani](#)

Pemerintah, kata Sri Mulyani, akan menindak tegas pihak-pihak yang membuat rupiah makin melemah. "Kalau tidak *legitimate* kami akan lakukan tindakan tegas agar tidak menimbulkan spekulasi atau sentimen negatif," ujarnya.

Sri Mulyani menjelaskan yang dimaksud dengan tindakan *legitimate* itu adalah jika seorang pengusaha mengimpor bahan baku atau barang modal dan jelas apa bisnisnya. "Kalau kita mengimpor bahan baku, barang modal, dan memang bisnisnya ada, untuk

bayar utang kembali. Memang ada kebutuhan yang legitimate, kalau tidak kan mereka lakukan sesuatu yang spekulatif," tuturnya.

Menurut Sri Mulyani, pelemahan rupiah ini tidak lepas dari perekonomian global yang belum stabil. Terlebih belakangan ini Argentina tengah dilanda krisis yang diprediksi akan berdampak ke negara berkembang.

Sri Mulyani menuturkan pemerintah tetap berkomitmen untuk memperkuat pondasi ekonomi dengan mendorong ekspor dan menekan impor. Selain itu, untuk di dalam negeri pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas jasa Keuangan terus mensinergikan koordinasi dari sisi informasi. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menstabilkan kondisi ini akan saling dibagi di antara otoritas ini.

"Sehingga kami bisa terus langsung lakukan penyesuaian kalau memang akan dilakukan," ujarnya.

Ia menjelaskan saat ini fokus pemerintah tetap pada bagaimana cara mengurangi sentimen dari neraca pembayaran. "Selama ini yang disebut sebagai salah satu sumber sentimen dari perekonomian Indonesia adalah kondisi dari transaksi berjalan dan neraca perdagangan," ujarnya.

Pemerintah, kata dia, sekarang sedang mengendalikan kebutuhan devisa lantaran menjadi aspek yang bisa dikontrol. Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian sedang mengidentifikasi 900 komoditas impor yang sebagian besar merupakan barang konsumsi.

Baca: [Rupiah Tembus Rp 14.700, Sri Mulyani: Kami Akan Waspada](#)

Selain itu, bagi Badan Usaha Milik Negara seperti Pertamina dan PLN, pemerintah akan melihat apa saja kebutuhan yang tidak bisa ditunda. "Kalau pun kebutuhan yang tidak bisa ditunda, bagaimana suplai dolar dilakukan tanpa mengubah sentimen market," ucap [Sri Mulyani](#).